



MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR: PER/ 15 / M.PAN/3/2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR 133/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mengembangkan jabatan fungsional Radiografer pada Instansi Pusat dan Daerah, maka dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 **tentang** Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4437**), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang **Nomor 8** Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 **Nomor 108**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 **tentang** Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun **1977 Nomor 11**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor **3098**), sebagaimana telah **beberapa** kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor **11** Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik **Indonesia** Tahun 2003 Nomor 17);
5. **Peraturan** Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 **tentang Jabatan Fungsional** Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran **Negara Republik** Indonesia Nomor 3547);
6. **Peraturan** Pemerintah **Nomor 32** Tahun 1996 **tentang** Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah **Nomor 97** Tahun **2000 tentang Formasi** Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan **Lembaran** Negara Republik Indonesia Nomor **4015**), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah **Nomor 99** Tahun 2000 **tentang** Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara;

- Memperhatikan :**
1. Usul Menteri Kesehatan Nomor OT.OO.SJN.1082 tanggal 23 September 2005;
  2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Surat Nomor K.26-30/V.26-10/93 tanggal 7 Maret 2006.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARANR NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARANR NEGARA NOMOR 133/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 21, menjadi berbunyi sebagai berikut :

### "Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Radiografer harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
  - a. berijazah Diploma III Radiologi;
  - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
  - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Penetapan jenjang jabatan Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Radiografer melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil".

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Maret 2006

MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



TAUFIQ EFFENDI